

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN	vi
ABSTRAK	vii
<i>ABSTARCT</i>	viii
GLOSARIUM	ix
DAFTAR SINGKATAN	x
RINGKASAN DISERTASI	xi
<i>SUMMARY</i>	xxi
DAFTAR ISI	xxx
BAB I: PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Permasalahan	1
1.2 Rumusan Masalah	15
1.3 Tujuan Penelitian Disertasi	16
1.4 Manfaat Penelitian Disertasi	17
1.5 Kerangka Konseptual Disertasi	17
1.6 Kerangka Teori Disertasi	21
1.6.1 Teori Teori Pertanggungjawaban Pidana	21
1.6.2 Teori Tindak Pidana Korupsi	24
1.6.3 Teori Keadilan	27
1.6.4 Teori Keadilan Hukum Islam	29
1.7 Kerangka Pemikiran Disertasi	35
1.8 Metode Penelitian	37
1.8.1 Paradigma Penelitian	37
1.8.2 Metode Pendekatan	37
1.8.3 Sifat Penelitian	39
1.8.4 Sumber Data Penelitian	39
1.8.5 Teknik Pengumpulan Data	41
1.8.6 Analisis Data	42
1.9 Orisinalitas/Keaslian Penelitian	43
1.10 Sistematika Penulisan Disertasi	45
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	47
2.1 Konsep Negara Hukum	47
2.2 Hukum Adat dalam Kerangka Sistem Hukum Nasional	54
2.3 Sistem Pemidanaan di Indonesia	64
2.4 Teori Pemidanaan	74
2.4.1 Teori Absolut atau <i>Vergeldings Theorieen</i> (Pembalasan) ...	74
2.4.2 Teori Relatif atau <i>Doel Theorieen</i> (Maksud dan Tujuan) ..	77
2.4.3 Teori Gabungan atau <i>Verenengings Theorieen</i>	78
2.4.4 Teori Keadilan	81
2.4.5 Teori Sistem Hukum	91
2.4.6 Teori Bekerjanya Sistem Hukum	94
2.4.7 Teori Perlindungan dan Tujuan Hukum	99

2.4.8 Teori Hukum Progresif	103
2.4.9 Teori Legal Pluralism	108
BAB III: PENGATURAN GRATIFIKASI DI DALAM UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI SAAT INI	114
3.1 Prinsip-Prinsip dan Penerapan Undang-Undang Gratifikasi	114
3.2 Kesalahan-kesalahan Penerapan Undang-Undang Gratifikasi	149
3.3 Penerapan Pembuktian Terbalik pada Kasus-Kasus Gratifikasi di Pengadilan	165
BAB IV: KELEMAHAN-KELEMAHAN DALAM PENGATURAN GRATIFIKASI DAN PEMBERIAN GRATIFIKASI DALAM UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP BUDAYA PEMBERIAN YANG TERJADI DI MASYARAKAT	184
4.1 Kelemahan Pembuktian Terbalik (<i>Omkering van het Bewijslat</i>) pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	184
4.2 Faktor Penghambat dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Gratifikasi	206
4.3 Bidang-Bidang yang Rentan Terhadap Gratifikasi	216
4.3.1 Bidang Pendidikan	216
4.3.2 Bidang Kesehatan	230
4.3.3 Bidang Layanan Publik	239
BAB V: REKONSTRUKSI PENGATURAN GRATIFIKASI DI DALAM UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI BERBASIS NILAI Keadilan YANG BERMARTABAT	250
5.1 Gratifikasi dan Kaitannya dengan Kebudayaan Masyarakat Indonesia	250
5.2 Hubungan Patron-Klien dan Gratifikasi dalam Kebudayaan	278
5.3 Nilai Budaya sebagai Aspek Pertimbangan Hukum	299
BAB VI: PENUTUP	328
6.1 Kesimpulan	328
6.1 Saran	330
6.3 Implikasi Kajian Disertasi	331
6.3.1 Teoritis	331
6.3.2 Praktis	332
DAFTAR PUSTAKA	333
DAFTAR INFORMAN	347
RIWAYAT HIDUP	349